

**AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan).**

(Skripsi)

Oleh

**ROBIANSYAH EKA PRATAMA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRACT**

### **Accountability, Transparency, and Participation in Village Fund Management (A Case Study In The Village in Natar Sub-district, South Lampung District).**

**By**

**ROBIANSYAH EKA PRATAMA**

This research aims to examine how the application of accountability, transparency, participation, and management of village funds in villages Natar District South Lampung regency. The sample in this research is obtained by using purposive sampling method.

Based on the existing criteria, obtained 32 respondents who became the sample of research spread over 22 villages in Kecamatan Natar.

The results of the research indicate that the management of village funds in villages in Natar Sub-district of South Lampung District is good enough to apply the principles and rules of accountability. However, for the principle of transparency, and participation in the management of village funds has not been maximally implemented either from the village government side or from the community side.

**Keywords: Accountability, Transparency, Participation, Management of village funds**

## **ABSTRAK**

**Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa  
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).**

**Oleh**

**ROBIANSYAH EKA PRATAMA**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengelolaan dana desa yang ada di desa-desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Berdasarkan kriteria yang ada, diperoleh 32 responden yang menjadi sampel penelitian yang tersebar di 22 desa di Kecamatan Natar.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas. Namun, untuk prinsip transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat.

**Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengelolaan Dana Desa.**

**AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

**ROBIANSYAH EKA PRATAMA**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA ( Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan )**

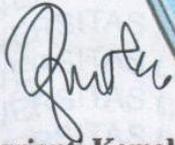
Nama Mahasiswa : **ROBIANSYAH EKA PRATAMA**

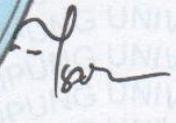
No. Pokok Mahasiswa : 1311031099

Jurusan : Akuntansi

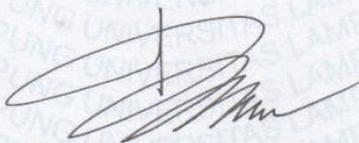
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



  
**Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt**  
NIP. 197008011995122001

  
**Ade Widiyanti, S.E.M.S.Ak., Akt**  
NIP. 198206232008120001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

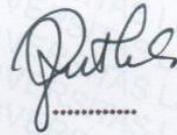


**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP. 196206121990102001

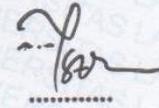
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

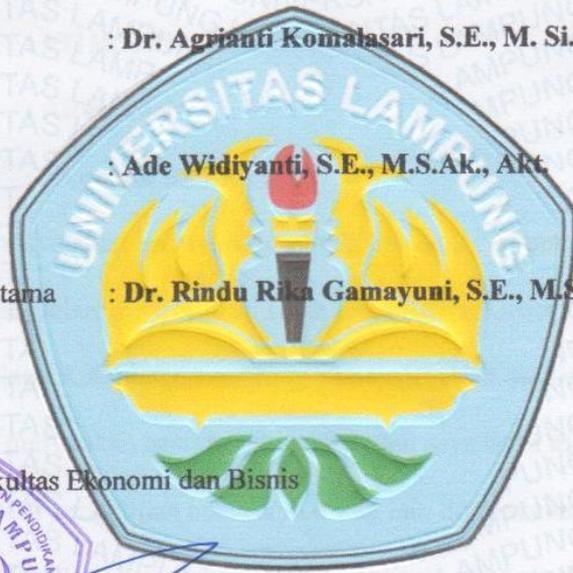
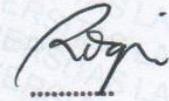
**Ketua : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M. Si., Akt.**



**Sekretaris : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.**



**Penguji Utama : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP. 19610904 198703 1 011

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Agustus 2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Robiansyah Eka Pratama

**NPM** : 1311031099

**Jurusan** : Akuntansi

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2018



Robiansyah Eka Pratama  
NPM. 1311031099

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Robiansyah Eka Pratama. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 2 April 1995 sebagai putra pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Samsul Rizal dan Ibu Eka Soviana

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Perwanida Metro pada tahun 2001. Kemudian pendidikan dasar di SD 1 Pahoman Bandar Lampung hingga tahun 2007. Lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 25 Bandar Lampung hingga tahun 2010 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung hingga tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis berorganisasi di internal kampus sebagai anggota aktif KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal) FEB Unila periode 2013-2014. Selain itu, penulis juga pernah diamanahkan menjadi pengurus KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal) FEB Unila sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat periode 2014-2015. Kembali diamanahkan menjadi pengurus KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal) FEB Unila

sebagai Ketua Umum periode 2015-2016. Lalu penulis diamanahkan menjadi pengurus DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) FEB Unila sebagai Ketua DPM periode 2016-2017. Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Islama (HMI) dan diamanahkan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi Unila sebagai Kepala Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan periode 2016-2017.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

**(QS. Al-Insyirah: 6-8)**

“Kerja Keras”

“Kerja Ikhlas”

“Kerja Tuntas”

“Yakin Usaha Sampai”

***(Himpunan Mahasiswa Islam)***

*“If you are not prepared with education and experience, a good opportunity will pass you by.”*

***(Anonymous)***

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku selama ini, karya ini

kupersembahkan kepada:

*Kedua orang tuaku tercinta,*

*Ayahandaku Samsul Rizal dan Ibundaku Eka Soviana*

*Kedua adikku tersayang,*

*Yosi Septia Rosa dan Reni Febrianti*

*Andungku terkasih, Hartini*

*Keluarga Besar Samsuar dan Baheramsyah Jenie*

*Teman-teman seperjuangan terbaikku*

*Kekasihku untuk kasih sayang dan motivasinya*

*serta*

*Almamaterku tercinta,*

*Universitas Lampung*

## SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, perhatian, bimbingan, serta nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, serta nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan evaluasi serta saran yang membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak. Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuannya dalam menyelesaikan proses belajar.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan, dan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
9. Kedua orang tuaku; Ayahanda Samsul Rizal dan Ibunda Eka Soviana untuk segala bentuk dukungan, didikan, dan perjuangannya demi keberhasilanku. Terimakasih untuk doa, nasihat, serta motivasi yang tak henti-hentinya selama ini.
10. Kedua adikku; Yosi Septia Rosa dan Reni Febrianti. Terimakasih untuk segala *support* dan bantuannya selalu. Ditunggu kesuksesannya dek, semangat!
11. Saudara Seperjuangan 2013; Hafizh, Bejo, Boy, Fabio, Ferdinan, Dimas, Arif, Lano, Sigit, Adit, Walfi, Hendro, Iqbal, Ammar, Amran, Bobby, Qiu, Wido, Yuni dan Acil. Jangan lelah untuk berproses. Hasil tidak akan mengkhianati Proses.

12. Keluarga “AEI”; Nina, Anis, Fatma, Keke, Cepe, Ayi, Faizah dan Yuda.  
Terimakasih untuk semua waktu dan momen yang telah dilalui, semoga sukses ya kalian semua!
13. Keluarga besar Akuntansi 2013, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  
Terimakasih atas kebersamaan dan canda tawa selama masa kuliah. Sukses selalu kawan.
14. Presidium KSPM 14/15. Bang Argi, Mba Danty, Mba Ria, Kak Ferly, Fabio, Arum, Rifka, Mba Puspa, Ghanes, Sigit, Qiu dan Ruri. Terimakasih abang-abang dan mbak-mbak serta teman sebaya atas bimbingannya selama setahun menjadi presidium.
15. *Best team ever*, Presidium KSPM 15/16. Sigit, Arum, Adit, Chatia, Rifka, Oftika, Nina, Ikhsan, Aji, Rindang, Umi dan Yanto. Terimakasih untuk satu tahunnya *guys*, Dengan kalian saya belajar arti sebuah keluarga, profesionalitas dan tanggung jawab.
16. Presidium DPM 16/17. Fabio, Hafis, Sigit, Ruchi, Lano dan yang lain yang tak bisa disebutkan satu persatu. Akan ada pelangi setelah hujan turun.  
Semangat kawan-kawan!
17. Kanda, Yunda, dan Adinda HMI Komisariat Ekonomi Unila yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bimbingan dan motivasi serta kekeluargaannya selama ini. Dengan niat tulus ikhlas, Yakin Usaha  
Sampai!
18. KKN *Squad*. Sarah, Diwang, Rifka, Nurul, Ayu dan Khairul. Terimakasih empat puluh hari KKN bersama serta momen-momen terbaiknya.

19. *Best mate*, Rini Yunita Sari yang selalu memberikan motivasi dalam setiap hal. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, doa, harapan, motivasi, dan waktu yang diluangkan untuk terus mendukung saya, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Semoga sukses ya, jangan lupa bahagia! Doaku menyertaimu.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2018  
Penulis,

**Robiansyah Eka Pratama**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>SANWACANA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 <i>Corporate Governance</i> .....	9

2.1.2	<i>Good Governance</i> dan Pengelolaan Dana Desa .....	10
2.1.3	Dana Desa dan Antisipasi Penyelewengan .....	11
2.2	Penelitian Terdahulu .....	13
2.3	Model Penelitian .....	15
2.4	Pengembangan Hipotesis .....	15
2.4.1	Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa .....	16
2.4.2	Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa .....	16
2.4.3	Partisipasi dan Pengelolaan Dana Desa .....	17
 <b>BAB III METODE PENULISAN .....</b>		<b>19</b>
3.1	Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	19
3.2	Indikator Penelitian .....	20
3.2.1	Akuntabilitas .....	20
3.2.2	<u>Transparansi</u> .....	21
3.2.3	<u>Partisipasi</u> .....	22
3.2.4	<u>Pengelolaan Dana Desa</u> .....	22
3.3	Lokasi Penelitian .....	23
3.4	Sampel Penelitian .....	23
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.5.1	Observasi .....	24
3.5.2	Kuisisioner .....	25
3.6	Metode Analisis Data .....	26
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	26
3.6.2	Uji Validitas .....	26

3.6.3 Uji Realibilitas.....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	28
4.1.1 Letak Geografis Kecamatan Natar.....	28
4.1.2 Keadaan Demografis.....	29
4.1.3 Penduduk.....	29
4.2 Deskripsi Responden.....	30
4.3 Demografi Responden.....	32
4.4 Statistik Deskriptif.....	34
4.4.1 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas.....	34
4.4.2 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Transparansi.....	35
4.4.3 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Partisipasi.....	36
4.4.4 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Dana Desa.....	37
4.4.5 Uji Validitas.....	37
4.4.6 Uji Realibilitas.....	39
4.5 Pembahasan.....	41
4.5.1 Akuntabilitas .....	41
4.5.2 Transparansi .....	43
4.5.3 Partisipasi .....	44
4.5.4 Pengelolaan Dana Desa.....	45

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Keterbatasan .....	47
5.3 Saran .....	48

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
3.1 Informan terkait pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Natar.....	24
4.1 Persentase Pengiriman dan Pengembalian Kuisisioner.....	30
4.2 Deskriptif Data.....	30
4.3 Informasi Umum Responden Penelitian.....	32
4.4 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas.....	34
4.5 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Transparansi.....	35
4.6 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Partisipasi.....	36
4.7 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Pengelolaan Dana Desa.....	37
4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas.....	38
4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi.....	38
4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi.....	39
4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa.....	39
4.12 Hasil Uji Realibilitas Variabel Akuntabilitias.....	40
4.13 Hasil Uji Realibilitas Variabel Transparansi.....	40
4.14 Hasil Uji Realibilitas Variabel Partisipasi.....	41
4.15 Hasil Uji Realibilitas Variabel Pengelolaan Dana Desa.....	41

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian .....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Melalui desa, pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakannya tanpa harus terjun langsung ke lapangan dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pada akhirnya kepada pemerintah desa. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui pemerintah desa yang mengakibatkan peran serta pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga mengatur penataan desa. Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. *Good Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja pemerintahan desa melalui *supervise* atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pengelolaan dana desa dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *Good Governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan desa yang lebih transparan bagi semua kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan pemerintahan desa akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan mensejahterahkan masyarakat (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Pengertian *Good Governance* menurut Mardiasmo (1999) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002) menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu bank dunia juga mensinonimkan

*Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat (Effendi,1996).

Berdasarkan pengertian *Good Governance* oleh Mardiasmo dan bank dunia yang sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka menuntut penggunaan konsep *Good governance* sebagai pemerintahan yang baik relevan dan berhubungan satu dengan lainnya. Ide dasarnya sebagaimana disebutkan Tangkilisan (2005) adalah bahwa negara adalah institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai *agent of change*. Dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *shareholders*.

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governance* (Osborne dan Geabler, 1992, OECD dan World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2006 dalam Zeyn, 2011) adalah:

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan social.
- 2) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.

- 3) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

Dalam penelitian Ni Wayan Rustiarini (2016) tentang *good governance* dalam pengelolaan dana desa disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apabila dikaitkan dengan makna dan hakikat pengelolaan sesungguhnya, masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah. Perencanaan dan penganggaran juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis.

Terdapat berbagai desa yang mencoba menerapkan prinsip *good governance* antara lain desa yang berada di Kecamatan Natar Lampung Selatan. Desa yang ada di Kecamatan Natar antara lain desa Bandar Rejo, Banjar Negeri, Branti Raya, Bumi Sari, Candi Mas, Haduyang, Hajimena, Krawang Sari, Mandah, Merak Batin, Muara Putih, Natar, Negara Ratu, Pancasila, Pemanggilan, Purwosari, Rejo Sari, Rulung herok, Rulung Raya, Sidosari, Sukadamai, dan desa Tanjung Sari.

Berdasarkan latar belakang di atas masalah penelitian ini adalah bagaimana *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, perbedaannya terletak pada objek yang digunakan pada penelitian. Objek penelitian ini adalah desa yang berada di Kecamatan Natar Lampung Selatan. Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah “Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Lampung Selatan)”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Natar Lampung Selatan ?
2. Bagaimana transparansi informasi pengelolaan dana desa di desa di kecamatan Natar Lampung Selatan ?
3. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Natar Lampung Selatan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Natar Lampung Selatan.

2. Untuk mengetahui transparansi informasi pengelolaan dana desa di kecamatan Natar Lampung Selatan.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Natar Lampung Selatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemahaman baru untuk menjelaskan teori yang sudah ada mengenai konsep *good governance* terhadap masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktik *good governance* yang sudah ada selama ini. Selain itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pengelolaan dana desa.
3. Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi *good governance* pada instansi pemerintahan khususnya pemerintahan desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wolfensohn, Presiden of the World Bank (1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Hardikasari, 2011). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Menurut Zimmerman (1977) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut *principles* karena menggantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, *principles* baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan

kepada agen baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai *principles* juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Moe (1984) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan agendapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan. Nyoto dan Fadzil (2011) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

Dalam konteks teori *signalling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton, 1987). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

APBD menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan

Abdullah, 2006). Menurut Fadzil dan Nyoto (2011), hubungan keagenan menimbulkan asimetri informasi yang menimbulkan beberapa perilaku seperti oportunistik, moral hazard, dan *adverse selection*. Perilaku oportunistik dalam proses penganggaran contohnya,

- 1) Anggaran memasukkan program yang berorientasi publik tetapi sebenarnya mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek mereka.
- 2) Alokasi program ke dalam anggaran yang membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang proses pemilihan, yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dapat berpartisipasi di dalamnya.

### **2.1.1 Corporate Governance**

*Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2002).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip

tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa,2008).

### **2.1.2 *Good Governance* dan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Teori**

Terminologi *governance* populer dibahas sejak studi yang dilakukan Bank Dunia tahun 1989. Setelah publikasi tersebut, istilah *governance* digunakan sebagai kriteria ketika hendak menyalurkan bantuan pembangunan kepada negara berkembang. Berbeda dengan terminologi *governance* yang hanya meliputi bentuk institusional-formal negara dan birokrasi, istilah *governance* meliputi proses dinamis manajemen, hubungan institusi dan organisasi, serta hubungan pemerintah dengan sektor publik, masyarakat sipil, dan swasta. Dapat dikatakan bahwa terminologi *governance* disini merupakan tradisi, institusi, dan proses determinasi penyelenggaraan kekuasaan negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta berdasarkan kepada kepentingan publik (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Konsep *good governance* di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good governance* dianggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai *agent of development* karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki (Kemendagri, 2016).

Perubahan paradigma ini merekonstruksi peran pemerintah yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim kondusif sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan

bertanggungjawab. *Good governance* juga sering dipersepsikan sebagai kepemimpinan yang baik (Nofianti dan Suseno, 2014). Kurtz dan Schrank (2007) menyatakan adanya keterkaitan antara *good governance* dengan kualitas aparatur pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi. Kompetensi profesional dan etika diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam rangka memberikan pelayanan publik (Ali, 2002). Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governance* (Osborne dan Gaebler, 1992, OECD dan World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2006 dalam Zeyn, 2011) adalah:

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan social.
- 2) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.
- 3) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

### **2.1.3 Dana Desa dan Antisipasi Penyelewengan**

Dana desa terlihat memiliki potensi luar biasa dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan desa. Namun dibalik dampak positif yang diberikan, tersimpan potensi bahaya korupsi didalamnya. Siap atau tidak

siap perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Perangkat desa harus memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan kebutuhan sumberdaya, proses pelaksanaan sampai pada penentuan indikator pelaksanaan kegiatan. Perangkat desa juga harus memahami sistem sistem akuntansi dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Apabila kepala desa tidak berhati-hati atau tidak mampu mengatur dan melaporkan sesuai aturan pemerintah, konsekuensinya bisa berhadapan dengan sanksi hukum. Kekhawatiran aparat desa atau kepala desa untuk menggunakan dana tersebut mesti diantisipasi dengan mengikuti aturan (Kompas, 2015).

*Good governance* merupakan salah satu bagian isu kebijakan strategis di Indonesia yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah (Santoso dan Pambelum, 2008), termasuk *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa. Perbaikan kinerja instansi pemerintah berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2002). Dalam bidang ekonomi, perbaikan kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedang dalam bidang politik perbaikan kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian, konsep *good governance* harus senantiasa diaplikasikan dalam setiap aktivitas pada instansi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang ditekankan pada penelitian ini.

Saat ini *good governance* tidak hanya didominasi pemerintah semata. Masyarakat mulai menunjukkan kapasitas dalam pembangunan. Komponen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan *good governance*, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Apabila aparat desa mengalami keterbatasan

sumber daya manusia seperti kebutuhan tenaga ahli, maka bisa dibantu pihak akademisi atau lembaga profesional. Akademisi berbagai perguruan tinggi berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat desa. Kementrian desa dan pemerintah kabupaten/kota juga harus membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang berkompeten dalam melakukan pendampingan. Peningkatan anggaran desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya desa yang berkualitas sebagai input yang bermanfaat, baik bagi desa itu sendiri maupun bagi desa lainnya.

Berdasarkan pemahaman atas kondisi riil itulah kemudian dimusyawarahkan suatu cara agar tidak terjadi kekeliruan maupun ketidakberesan dalam mengelola program desa. Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Dependen</b>	<b>Variabel Independen</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Ni Wayan Rustiarini (2016)	Pengelolaan dana desa	<i>Good Governance</i>	Pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai mekanisme prinsip <i>good governance</i> .
2.	Titiek Puji Astuti dan Yulianto (2015).	Pengelolaan dana desa	<i>Good Governance</i>	Dalam penjabaran UU Desa, salah satu instrumen yang mendasar adalah dengan dialokasikannya dana desa yang

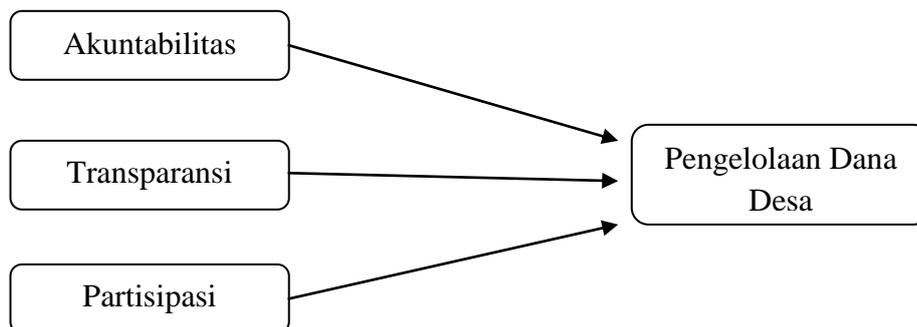
				bersumber dari APBN, sebagai pengejawantahan paradigma desa membangun, yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa.
3.	Anas Heriyanto (2015).	<i>Good Governance</i>	Tata Kelola Pemerintahan Desa	Upaya Pemerintah Desa Triharjountuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatankapasita skemampuanPerangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
4.	Riyanto, T (2015).	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Akuntabilitas Finansial	Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

5.	Tumbel, S.M (2016).	Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi masih sangat rendah
----	---------------------	-----------------------	------------------------	---

### 2.3 Model Penelitian

Kerangka pemikiran mengenai penelitian ini digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu rumusan yang menyatakan adanya hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih. Hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris (Indriantoro & Supomo, 2014).

### **2.4.1 Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP 2000).

### **2.4.2 Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan

pemerintah yang dapat di jangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas, 2003).

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Bappenas, 2003).

### **2.4.3 Partisipasi dan Pengelolaan Dana Desa**

Partisipasi menurut LAN dan BPKP (2000) adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk

mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran menurut Sulistionidan Hendriadi (2004) dalam Taufik (2013) mencakup hal-hal berikut:

- a) Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
- b) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai *mediacheckand balances*.
- c) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong (2005), yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sehingga penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif. Menurut Suryabrata (2012) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat penggambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

### 3.2 Indikator Penelitian

#### 3.1.1 Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa yang telah di sesuaikan. Indikator

Akuntabilitas menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu :

#### Tahap Perencanaan

No.	Indikator	No Kuisiner
1.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	1
2.	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	2
3.	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	3
4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	4

#### Tahap Penatausahaan

No	Indikator	No Kuisiner
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	5
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	6
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	7
4.	Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	8

### Tahap Pelaporan

No.	Indikator	No Kuisiner
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun.	9
2.	Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.	10
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	11
4.	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	12

### Tahap Pertanggungjawaban

No.	Indikator	No Kuisiner
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	13
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	14
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.	15

#### 3.1.2 Transparansi

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa yang telah di sesuaikan. Indikator Transparansi menurut permendagri no.113 tahun 2014 :

No	Indikator	No Kuisiner
1	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan	16
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat	18

	secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat	22

### 3.1.3 Partisipasi

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa yang telah di sesuaikan.

No.	Indikator	No Kuisisioner
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi, dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.	23
2.	Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.	26
3.	Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari <i>output</i> , sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.	29

### 3.1.4 Pengelolaan Dana Desa

No	Indikator	No Kuisisioner
1	Pengelolaan anggaran dilakukan secara ekonomis, menghindari pengeluaran boros dan tidak produktif.	30
2	Pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, untuk mencapai kesejahteraan desa.	31
3	Pengelolaan anggaran dilakukan secara merata tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat desa tertentu	33

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*). Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Desa yang berada di Kecamatan Natar Lampung Selatan. Alokasi dana desa diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi-potensi desa. Potensi desa yang ada harus diimbangi dengan aparatur desa yang mampu mengelola potensi-potensi desa tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk memilih lokasi di Kecamatan Natar Lampung Selatan sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

### **3.4 Sampel Penelitian**

Menurut Moleong (2005) pada dasarnya penelitian kualitatif mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu menentukan informan dalam memperoleh informasi yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria. Desa yang ada di Kecamatan Natar antara lain desa Bandar Rejo, Banjar Negeri, Branti Raya, Bumi Sari, Candi Mas, Haduyang, Hajimena, Krawang Sari, Mandah, Merak Batin, Muara Putih, Natar, Negara Ratu, Pancasila, Pemanggilan,

Purwosari, Rejo Sari, Rulung herok, Rulung Raya, Sidosari, Sukadamai, dan desa Tanjung Sari. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka informan peneliti dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan terkait pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Natar

No	Informan
1	Kepala Desa
2	Sekretaris Desa
3	Kepala Urusan Keuangan
4	Kepala Seksi Pemerintahan
5	Badan Permusyawaratan Desa
6	Masyarakat Desa
7	Kepala Kecamatan Natar Lampung Selatan

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Observasi**

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi

sarana dan prasarana yang ada, proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta kendala-kendala dalam penganggaran dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati hasil dari kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa serta penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan tujuan diberikannya alokasi dana desa sebagai acuan pelaksanaan kegiatan melalui penggunaan alokasi dana desa. Pengamatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara program-program yang telah dibuat dengan pelaksanaannya. Melalui pengamatan tersebut dapat diketahui tingkat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

### **3.5.2 Kuisisioner**

Disebutkan dalam Arikunto (2006) kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadinya. adapun pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan berstruktur. Pertanyaan berstruktur bertujuan agar jawaban yang diberikan oleh responden dapat dibatasi, hal ini bertujuan agar peneliti memperoleh informasi berupa jawaban tertulis mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dari responden. Kuisisioner berisi daftar pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa oleh tim pelaksana, dimana pertanyaan tersebut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro & Supomo, 2014).

#### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, sum, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013).

#### **3.6.2 Uji Validitas**

Menurut Sugiyono (2014) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.

Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila

koefisien korelasi  $r = 0,05$ , jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari  $0,05$  maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan “Tidak Valid”.

### **3.6.3 Uji Realibilitas**

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrument dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang (Sudjana, 2005) Pengukuran reliabilitas tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus alpha ronbach, apabila nilai alpha  $> 0.70$  maka instrument yang digunakan adalah reliable.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengelolaan dana desa yang ada di desa-desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Adapun hasil analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa indikator akuntabilitas yang belum maksimal diterapkan
2. Penerapan transparansi yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa indikator akuntabilitas yang belum maksimal diterapkan
3. Penerapan partisipasi yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih belum maksimal, karena beberapa indikator partisipasi belum maksimal diterapkan dan masih kurangnya partisipasi aktif masyarakat yang ada.

4. Penerapan pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah menerapkan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana serta alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan pelayanan masyarakat desa sehingga dikatakan baik.

Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan pengelolaan dana desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas. Namun, untuk prinsip transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat.

## **5.2 Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Keandalan validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini nampak belum teruji dengan baik, karena terdapat beberapa indikator yang dieliminasi (validasi). Peneliti menduga kemungkinan adanya faktor lain yaitu penerjemahan yang kurang baik, terutama *setting* bahasa yang belum sesuai dengan kondisi responden.
2. Menggunakan skala *likert* 1 s.d 3, sehingga belum maksimal dalam merumuskan hasil dari jawaban responden.
3. Sampel pada penelitian ini hanya desa-desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Selatan diluar sampel.

### 5.3 Saran

Untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan diatas maka penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya dilakukan *setting* bahasa untuk kuisisioner agar lebih mudah dipahami oleh responden.
2. Penelitian selanjutnya menggunakan skala likert 1 s.d 5 agar lebih maksimal untuk mengambil kesimpulan.
3. Perlu dilakukan pengembangan indikator *instrument* penelitian yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan objek yang diteliti.
4. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel penelitian agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. 2002. *Administrative Ethics and Professional Competence Accountability and Performance under Globalization. International Review of Administrative Sciences*. Vol. 68, pp. 127.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwiyanto, A. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Galang Printika. Yogyakarta.
- Evans, J. H. dan J. M. Patton. 1987. *Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting. Journal of Accounting Research* 25: 130–158.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2 (1): 53-64.
- Hoesada, J. 2014. *Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP)*. Jakarta.
- Indriantoro, N. dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.
- Purnomo, J.S. 2016. *Kecamatan Natar Dalam Angka 2016*. Lampung Selatan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan.
- Kurtz, M. J., dan Schrank, A. 2007. *Growth and Governance Models, Measures, and Mechanisms, The Journal of Politics*, Vol. 69, No. 2, pp. 538–554.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI*, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Moe, T.M. 1984. *The New Economics of Organization. American Journal of Political Science*, 28 (5): 739-777.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Nofianti, L dan N, Susantie. 2014. *Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and Their Implications towards Performance Accountabilitay*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol. 164, pp. 98-105.
- Nyoto, H dan F. H. Fadzil. 2011. *Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*. *World Review of Business Research* 1 (2): 51-70.
- Prasojo, E. dan T. Kurniawan. 2008. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance Kasus Best Practices dan Sejumlah Daerah di Indonesia*. Makalah disajikan dalam *The 5th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia*. Banjarmasin.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
- Riduwan. 2011. *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung : Alfabeta
- Santoso, U dan Y. J. Pabelum. 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4, No. 1, pp. 14-33.
- Sudjana.2005. *Metode Statistika Edisi ke-6*. Bandung : Tarsito
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. C.V. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V.W. 2014. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press
- Supriyadi, E. 2014. *SPSS+Amos Statistical Data Analysis*. Jakarta. In Media
- Suryabrata, S. 2012. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tresiana, N. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. *tentangDesa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan daerah*.
- Utomo, T. W., dan A. Wahyudi. 2008. *Penataan kewenangan (urusan) Pemerintah Desa dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)*. *Jurnal Borneo Administrasi* Vol. 4 No.2.
- Zimmerman, J. L. 1977. *The Municipal Accounting Maze An Analysis of Political Incentives*. *Journal of Accounting Research* 15: 107-144.